

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 1981-2008

SITI ZULAIKA

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email : Szulaika460@gmail.com

Agus Tri Laksana

S-1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Kemiskinan merupakan suatu kondisi sosial ekonomi manusia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar yang menjadi hak manusia meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, Pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak dalam partisipasi kehidupan sosial politik. Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang tergolong dalam daerah yang paling miskin, dalam urutan nomer dua paling miskin di Jawa Timur. Kabupaten Bojonegoro digambarkan sebagai salah satu daerah yang termiskin antara tahun 1981 sampai tahun 2004. Berdasarkan dengan hal tersebut memunculkan persoalan bahwa (1) Apa yang melatarbelakangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Bojonegoro antara tahun 1981—2008 ? (2) Mengapa Kabupaten Bojonegoro merupakan wilayah yang masuk dalam kategori miskin antara tahun 1981-2008? (3) Bagaimana upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro tahun 1981-2008.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro disebabkan karena sumber daya manusia yang masih rendah. Kurangnya inovasi, kreativitas dan kesempatan untuk bersosialisasi juga mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan, diantaranya persoalan masyarakat yang melingkar antara lemahnya masyarakat yang miskin dalam mengembangkan potensi diri dan tertutupnya potensi diri untuk lebih berkembang di kalangan masyarakat. Kemudian birokrasi pemerintah daerah selama tahun 1981-2008 masih kurang baik, sehingga menyebabkan kemiskinan yang berkelanjutan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Kabupaten Bojonegoro berada dalam kategori kemiskinan yaitu termasuk wilayah Kabupaten Bojonegoro sendiri, kurangnya irigasi, termasuk daerah terisolir dan peran pemeritahan yang kurang baik. penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Bojonegoro dilakukan dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan melakukan revitalisasi pembangunan daerah, serta memperbaiki beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

Kata Kunci : Penanggulangan Kemiskinan, Perekonomian, Kebijakan

Abstract

Poverty is a human socio-economic condition that can not fill the basic needs. The basic needs of human rights include food, health, education, employment, housing, clean water, land, natural resources, the environment, security from the treatment or threats of violence and rights in the participation of social and political life. Bojonegoro regency is one of the poorest areas, number two of the poorest in East Java. Bojonegoro regency was described as one of the poorest areas between 1981 and 2004. Based on this it raises the issue that, (1) What lies behind the poverty that existed in Bojonegoro regency between 1981-2008? (2) Why is Bojonegoro Regency include a poor category between 1981-2008, (3) What is the effort of local government to reduce poverty level in Bojonegoro regency beteen 1981-2008. The results of this study can be successfully summarized as follows; first, the poverty that occurred in Bojonegoro regency caused by the low human resources. Lack of innovation, creativity and opportunities to socialize also have an influence on poverty, among them the circular community's problems between the poor of the poor in developing self-potential and the closed self-potential to further develop in the community.

Then, the local government bureaucracy during 1981-2008 was not good enough, causing sustained poverty. The factors that cause Bojonegoro Regency are in the category of poverty that includes of Bojonegoro regency, lack of irrigation, including isolated areas and the role of bad government. The existing poverty alleviation in Bojonegoro Regency is done by improving the quality of human resources and revitalizing regional development, as well as improving some factors causing poverty in Bojonegoro regency.

Keywords: Poverty Reduction, Economy, Policy

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara yang berkembang telah mencatat perkembangan kemiskinan mulai tahun 1976. Pada dekade 1976-1996, persentase penduduk miskin di Indonesia pernah mengalami penurunan yaitu dari 40,1% menjadi 11,3%, namun pada periode 1996-1998 angka ini menjadi 24,29% atau 49,5 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia. Bahkan International Labour Organization (ILO) memperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 129,6 juta atau sekitar 66,3% (BPS, 1999). Kemiskinan yang ada di Indonesia perlu diperhatikan adanya lokalitas yang ada di daerah-daerah tingkat lokal. Dilihat dari tingkat kemiskinan yang ada di Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro termasuk salah satu wilayah yang relatif memiliki jumlah kemiskinan yang cukup tinggi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan merupakan suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan dalam kehidupannya. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau masyarakat meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu daerah yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bojonegoro yang awalnya bernama Rajekwesi merupakan salah satu wilayah kekuasaan Kolonial Belanda. Pusat pemerintahan Kabupaten Bojonegoro pertamakali berada di daerah Jipang, yang mencakup daerah Cepu dan Padangan. Pada tahun 1900, Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian dari Residensi Rembang, tetapi pada 1 juli 1928 Kabupaten Bojonegoro dipisahkan dari Residensi Rembang, dan menjadi Residensi tersendiri dengan nama Residensi Bojonegoro, yang wilayahnya meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Kemudian tahun 1931 Kabupaten Bojonegoro dimasukan dalam Wilayah Residensi Gresik.¹ Kabupaten Bojonegoro yang digambarkan sebagai salah satu daerah termiskin dan paling terbelakang di Jawa. Berdasarkan pernyataan Penders dan de Vries serta laporan Residen Rembang Fraenkel kepada gubernur Jendral maka dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi Kabupaten Bojonegoro sangat buruk. Perlu diketahui bahwa Kabupaten Bojonegoro disebut-sebut sebagai daerah yang sangat terpuruk, sering kali penduduknya mengalami kelaparan.²

Sehubungan dengan itu Penders menyatakan bahwa Kabupaten Bojonegoro sebagai daerah di wilayah karesidenan Rembang yang termiskin, terbelakang dalam soal sosial-ekonominya.³ Meskipun demikian Kabupaten Bojonegoro memiliki sumber daya alam cukup baik, hingga dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan tambahan Pemerintah Kolonial Belanda pada masa itu. Adapun sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bojonegoro yang dijadikan sebagai produk salah satunya adalah kayu jatinya yang terkenal mempunyai kualitas yang bagus.

Letak wilayah Bojonegoro yang berada di sejalur sungai bengawan solo, maka pada saat musim hujan selalu terjadi banjir dan sering terjadi bencana alam yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro dikarenakan kondisi tanah yang tandus. Musim hujan yang terjadi setiap tahun mengakibatkan bencana banjir, yang kemudian mengakibatkan tingkat produktifitas pertanian menjadi rendah. Banjir dan kemarau mengakibatkan kegagalan panen, gagal panen yang terjadi berturut-turut, seperti pada tahun 1904 hingga 1906, yang mengakibatkan kekurangan bahan makanan dan selanjutnya terjadi kelaparan. Keadaan seperti itu pernah dilaporkan oleh Fraenkel sebagai Residen Rembang kepada Gubernur Jenderal pada tahun 1906, namun Pemerintah pusat menganggap biasa saja dan belum begitu mengkhawatirkan. Hingga Prof de Vries menyebutkan bahwa Kabupaten Bojonegoro sebagai daerah yang menuju "kematian" Sama Seperti daerah Cirebon Selatan dan Pekalongan Selatan.⁴

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang tergolong dalam daerah yang paling miskin, dalam urutan nomer 2 paling miskin di Jawa Timur. Meskipun demikian, Kabupaten Bojonegoro dapat keluar dari daerah yang paling miskin dan menjadi daerah yang tergolong sejahtera. Penulis beranggapan bahwa kemiskinan yang ada di Kabupaten Bojonegoro sangat menarik untuk dikaji, hal tersebut jika dibandingkan dengan keadaan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bojonegoro yang cukup maju, seperti tembakau, pohon jati, dan daerahnya yang kaya akan sumber minyak. Selain itu, kemiskinan yang ada di Kabupaten Bojonegoro juga akan memicu banyak pertanyaan jika suatu daerah memiliki sumber daya alam yang tinggi, namun masih tergolong daerah yang miskin di Jawa Timur hingga tahun 2008.

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Bojonegoro antara taun 1981-2008 ?

¹ Penders, 1984. *C.L.M Bojonegoro 1900-1942. A Story of Endemic Poverty in North East Java Indonesia*. Singapura: Gunung Agung. Halaman: 32

² MudjiHartono. *Realisasi Politik Etis di Bojonegoro Pada Awal Abad XX: Kajian Sosial- Ekonomi*. Halaman 3

³ Ibid., Halaman 47

⁴ Vries de E. *Masalah-masalah Petani Jawa*. Jakarta: Bhratara, 1972., Halaman 19.

2. Mengapa Kabupaten Bojonegoro merupakan wilayah yang masuk dalam kategori miskin antara tahun 1981-2008?
3. Bagaimana upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro tahun 1981-2008?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Metode penelitian sejarah adalah suatu proses pengujian dan analisis sumber atau laporan dari masa lampau secara kritis.⁵

Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti dalam menulis penelitian ini adalah tahap heuristik, tahap ini digunakan untuk menemukan sumber—sumber yang memiliki keterkaitan dengan topik yang telah dipilih penulis, yaitu tentang kemiskinan. Pemelusuran sumber yang digunakan dapat menggunakan sumber primer, sekunder dan dapat menggunakan data-data kepustakaan lainnya yang relevan. Penelusuran sumber primer dilakukan penulis di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Bojonegoro yang berada di Kabupaten Bojonegoro, Badan Pusat Statistik di Kabupaten Bojonegoro, Badan Pusat Statistik di Surabaya, Arsip Provinsi Jawa Timur yang berada di Surabaya, Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Timur yang berada di Surabaya serta Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya.

Tahap selanjutnya yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kritik sumber yang telah dikumpulkan dan disusun berdasarkan klarifikasi urutan pembahasan. Kritik sumber yang dilakukan adalah kritik intern, yaitu dengan mengidentifikasi sumber untuk mengetahui fakta-fakta yang memuat dalam sumber dan menekankan pada kebenaran isi sumber. Tahap selanjutnya yang dilakukan dalam penelitian adalah interpretasi, interpretasi yang merupakan proses untuk menggabungkan antara fakta satu dengan fakta yang lain dengan melakukan analisis-sintesis untuk membantu menjelaskan dalam penulisan. Tahap yang terakhir yang dilakukan dalam penelitian adalah historiografi yang merupakan penulisan sejarah secara kronologis dan berdasarkan dengan fakta dan data. Hasil dari rekonstruksi fakta dan data yang telah disusun, ditulis dengan historiografi yang menarik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kondisi geografis, kurangnya sarana dan prasarana, jumlah penduduk, ketenagakerjaan, rendahnya pendidikan dan

rendahnya kualitas kesehatan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kondisi Wilayah Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro memiliki wilayah hutan sebesar 42 persen. Besarnya wilayah hutan tersebut menjadikan banyaknya wilayah yang tergolong miskin. Hal tersebut dikarenakan petani tidak mempunyai hak kepemilikan tanah. Sedangkan, mayoritas pekerjaan masyarakat yang ada di Kabupaten Bojonegoro adalah petani. Masyarakat di Kabupaten Bojonegoro yang mayoritas bekerja sebagai petani kurang mendapat sarana dan prasarana dalam pekerjaannya.

Kabupaten Bojonegoro juga tergolong dalam salah satu daerah yang terisolir.⁶ Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Bojonegoro berada di posisi yang kurang menguntungkan jika dilihat dari segi akses ekonomi. Kabupaten Bojonegoro jika dilihat dari letaknya yang tidak berada di jalur pantura dan jalur selatan. Jalur pantura dan jalur selatan dapat memudahkan dalam akses ekonomi dan bisnis.

2. Minimnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kegiatan di masyarakat. Jika mayoritas pekerjaan masyarakat adalah petani, maka sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh petani harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan di bidang pertanian. Kurangnya sarana dan prasarana dapat menjadikan masyarakat tidak berkembang. Di Kabupaten Bojonegoro masih belum banyak membangun irigasi. Irigasi yang ada di Kabupaten Bojonegoro hanya ada satu yaitu waduk pacal, yang sudah sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda.⁷

3. Jumlah Penduduk

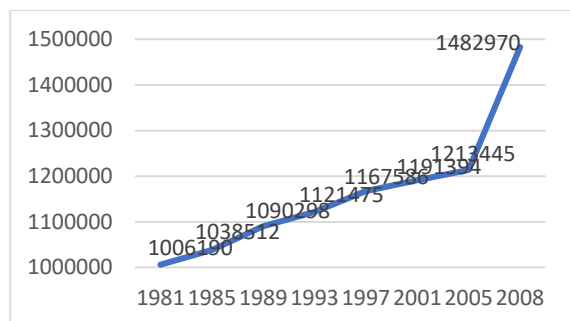
Data jumlah penduduk suatu wilayah dapat digunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengetahui penyebaran penduduk. Selain itu, jumlah penduduk juga dapat digunakan sebagai salah satu pola pembangunan daerah. Jadi, antara jumlah penduduk yang cukup besar ada di Kabupaten Bojonegoro akan mempunyai pengaruh yang besar pula terhadap perkembangan tingkat kesejahteraan Kabupaten Bojonegoro.

Grafik 1. Grafik Jumlah Pendudukan Kabupaten Bojonegoro Tahun 1981—2008

⁵ Louis Gotschalk, 1973, *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*, Depok: UI Press, halaman. 5.

⁶ Wawancara dengan Bapak AW Syaiul Huda, Direktur Bojonegoro Institute. Tanggal 10 April 2018

⁷ Wawancara dengan Bapak AW Syaiul Huda, Direktur Bojonegoro Institute. Tanggal 10 April 2018



Sumber : BPS Kabupaten Bojonegoro. Diolah oleh penulis.

Dilihat dari grafik jumlah penduduk diatas, terdapat kenaikan penduduk secara berkala di setiap tahunnya. Penduduk di Kabupaten Bojonegoro dapat dipastikan mengalami kepadatan penduduk karena dari tahun ke tahun selalu mengalami penambahan penduduk mulai dari tahun 1981 hingga tahun 2008.

4. Ketenagakerjaan

Perkembangan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya dapat mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja. Kesempatan bekerja dan pencari kerja dapat dikatakan menjadi salah satu masalah yang paling besar dan menjadikan perhatian yang besar bagi pemerintah. Dalam ketenagakerjaan di masyarakat, sumber penghasilan utama dalam rumah tangga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang akan mencerminkan kondisi sosial ekonomi.

Data ketenagakerjaan di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan dengan jumlah penduduk yang tergolong dalam usia kerja dan pencari kerja mengalami kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya. Sedangkan kesempatan bekerja atau lowongan pekerjaan yang ada di Kabupaten Bojonegoro tergolong rendah. Hal tersebut pastinya juga dipengaruhi dengan jumlah penambahan penduduk dan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Tingkat kualitas sumber daya manusia yang rendah juga dapat mempengaruhi tingkat pendidikan.

5. Rendahnya Pendidikan

Pendidikan memiliki peran dan pengaruh yang sangat tinggi terhadap angka kemiskinan. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia untuk memiliki kualitas lebih baik. Pendidikan juga menjadi salah satu kebutuhan dasar untuk masyarakat. Dengan adanya pendidikan yang rendah di Kabupaten Bojonegoro, maka dapat mempengaruhi kesempatan bekerja masyarakat. Di Kabupaten Bojonegoro mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, hal tersebut dikarenakan mayoritas penduduk juga memiliki pendidikan yang rendah. Pendidikan mempunyai pengaruh yang besar terhadap

kesempatan bekerja. Rendahnya pendidikan yang ada di Kabupaten Bojonegoro menjadikan mayoritas masyarakat memilih bekerja sebagai petani tanpa memiliki pengetahuan yang lebih tentang bidang pertanian.

6. Rendahnya Kualitas Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan sebagai penentu tingkat sumber daya manusia. Kesehatan juga merupakan salah satu upaya penting dalam proses pembangunan ekonomi dan memiliki peran yang penting pula dalam penanggulangan kemiskinan.

Tabel 1. Layanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bojonegoro Tahun 1981-2008

Tahun	Jumlah			
	Puskesmas	Rumah Sakit	Dokter	Bidan
1981	29	-	13	47
1991	32	1	54	57
2001	38	4	87	321
2008	68	8	163	506

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Diolah oleh penulis.

B. Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang besar bagi Kabupaten Bojonegoro. Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro terutama memang disebabkan oleh iklim dan kondisi tanah yang kurang mendukung, kondisi tanah yang ada di Kabupaten Bojonegoro tandus dan iklimnya tidak menentu. Pada musim kemarau, sebagian wilayah yang ada di Kabupaten Bojonegoro mengalami kekeringan dan pada musim hujan sebagian wilayah di Kabupaten Bojonegoro mengalami banjir. Mayoritas pekerjaan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro adalah bekerja sebagai petani, maka yang menjadi salah satu kestabilan dalam dalam produktifitas pertanian tidak akan bisa lepas dari pengkairan. Adapun wilayah yang tergolong miskin di Kabupaten Bojonegoro jika dilihat dari tabel diatas adalah wilayah Kecamatan Malo, Kedungadem, Sugihwaras, Ngambon, Temayang dan Baureno. Kemajuan di bidang pertanian dapat memberikan pendapatan masyarakat meningkat jika kebutuhan yang digunakan dalam pertanian dapat terpenuhi, terutama dalam bidang pengairan.

Pada tahun 1995, di Kabupaten Bojonegoro terjadi perbedaan yang jelas dalam perekonomian desa. Perbedaan taraf hidup bukan hanya disebabkan oleh satu faktor saja, namun disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Lokasi desa
2. Penduduk desa
3. Sarana prasarana desa, dan
4. Faktor yang lain.⁸

⁸ Robert J. Kodoatie, Suharyanto, Sri Sangkawati, Sutarto Edhisono.2001. *Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi. Halaman 21

Faktor lain yang dimaksudkan dalam poin 4 yaitu faktor lain yang menyebabkan perbedaan tingkat kemajuan desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

Adanya perbedaan taraf hidup dapat dijadikan sebagai Patokan perkembangan suatu wilayah. Lokasi desa merupakan penentu utama dalam perkembangan wilayah, yang juga akan berpengaruh besar terhadap masyarakat. Seperti lokasi desa yang ada di dataran tinggi ataupun dataran rendah, dan juga lokasi desa yang berada tidak jauh dari pusat kota tentu berbeda dengan lokasi desa yang berada di daerah pinggiran atau berada jauh dari pusat kota.

Penduduk desa juga termasuk salah satu faktor penentu dalam perkembangan suatu wilayah. Penduduk desa dapat dilihat dari jumlah kepadatan penduduk dan membandingkannya dengan luas daerah yang ada di suatu desa. Selain itu, angka kelahiran, angka kematian dan angka ketenagakerjaan penduduk dalam usia kerja juga sangat berpengaruh terhadap taraf hidup. Berikut ini merupakan tabel kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro mulai tahun 2002 sampai 2008:

Tabel 2. Jumlah penduduk miskin, Presentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2002-2008

N o	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Presentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/kap/bulan)
1	2002	332.70	28.34	115,038
2	2003	340.90	28.12	122,329
3	2004	336.90	27.70	114,085
4	2005	323.90	27.12	124,409
5	2006	350.89	28.38	138,501
6	2007	321.46	26.37	145,238
7	2008	292.70	23.87	149,846

Berdasarkan dengan tabel diatas, presentase penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro paling tinggi sebanyak 28,38 % di tahun 2002 dan paling rendah sebanyak 23,87 % di tahun 2008. Jumlah presentase penduduk miskin yang ada di Kabupaten Bojonegoro termasuk tinggi karena lebih dari jumlah penetapan kemiskinan yang ada di Jawa Timur yaitu 15%. Presentase kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi tiga klaster yaitu yang termasuk dalam klaster pertama mempunyai tingkat kemiskinan dengan golongan kawasan miskin sebesar 27,79 %, klaster kedua

sebesar 15,48% yang tergolong Kawasan sedang dan yang ketiga sebesar 11,06% yang tergolong dalam Kawasan kaya.

Kabupaten Bojonegoro berada di peringkat nomer 2 dari bawah se-Jawa Timur pada tahun 2002, yang tergolong sebagai daerah miskin. Penyebab kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro dibedakan menjadi dua kategori, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kemiskinan alamiah

Kemiskinan yang terjadi secara alamiah memang ada, seperti kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Terdapat beberapa faktor yang menjadikan masyarakat terjatuh dalam kemiskinan alami. Kemiskinan alamiah yang timbul sebagai adanya akibat sumber daya alam dan atau dikarenakan adanya tingkat perkembangan teknologi yang masih rendah. Sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bojonegoro dapat terbilang banyak, antara lain: seperti pohon jati, industri kerajinan, migas, tembakau dan lain-lain. Sumber daya alam yang paling besar di kabupaten Bojonegoro adalah migas. Migas tidak dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro karena migas membutuhkan tenaga, teknologi dan modal yang besar dalam mengembangkannya.

b. Kemiskinan buatan

Kemiskinan buatan atau kemiskinan struktural ini terjadi di Kabupaten Bojonegoro, kemiskinan buatan ini dapat terjadi jika di dalam masyarakat terdapat kecemburuan sosial-ekonomi. Kecemburuan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat atau kelompok masyarakat yang tidak menguasai sarana ekonomi atau fasilitas yang ada di masyarakat. Hal tersebut pastinya menjadikan adanya beberapa maskarakat tetap miskin meskipun sebenarnya jumlah produksi yang dihasilkan oleh masyarakat jika dibagi rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat dari kemiskinan.

Kemiskinan buatan atau kemiskinan struktural biasanya terlihat sangat menonjol di masyarakat, yang sangat terlihat pebedaanya yaitu antara kelompok masyarakat yang miskin dan kelompok masyarakat yang berkecukupan atau hidup dalam kemewahan. Salah satu ciri-ciri dari kemiskinan struktural adalah adanya ketergantungan yang kuat dari kelompok masyarakat yang miskin terhadap kelompok yang memiliki kelas sosial-ekonomi diatasnya. Mayoritas pekerjaan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro adalah petani yang mana tidak semua petani juga memiliki lahan sendiri atau beberapa juga memiliki lahan namun tidak banyak. Beberapa petani yang ada di Kabupaten Bojonegoro biasanya mencari tambahan penghasilan dengan menjadi buruh tani, yang mana mengerjakan lahan pertanian milik orang lain. Peran pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro mempunyai pengaruh yang besar terhadap daerahnya. Sebelum tahun 2008, birokrasi pemerintah daerah di Kabupaten Bojonegoro kurang baik.⁹ Banyak terjadi penyelewengan hak

⁹ Wawancara dengan Bapak AW Syaiful Huda, Direktur Bojonegoro Institute. Tanggal 10 April 2018

masyarakat, korupsi, pemerintah tidak berpihak pada rakyat dan kurang memperhatikan daerah Kabupaten Bojonegoro. Sesuai dengan teori Chambers, bahwa ketidakberdayaan masyarakat yang miskin disebabkan karena minimnya akses hukum dan perhatian pemerintah yang didapatkan oleh masyarakat.

C. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam Mengatasi Kemiskinan

Pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah pastinya telah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Bojonegoro, tetapi terlalu banyak penduduk miskin yang ada di wilayah pedesaan kemungkinan menjadikan wilayah Kabupaten Bojonegoro relatif tidak banyak terjadi perubahan jika dilihat dari tahun ke tahun.

Kebijakan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam memperbaiki tingkat kesejahteraan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah melakukan berbagai upaya yang digunakan untuk melakukan proses penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Kebijakan pemerintah daerah yang berusaha melakukan penanggulangan kemiskinan tersebut didukung oleh Lembaga sipil dan SKPD, yang di koordinasi oleh TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Dalam melakukan penanggulangan, pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga melakukan kerjasama dengan TNP2K (Tim Nasional Penanganan dan Penanggulangan Kemiskinan). Kebijakan yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan yang ada di masyarakat berada pada level atau tingkatan tertentu yang sesuai dengan kriteria kemiskinan yang dialami oleh masyarakat. Berikut ini merupakan kebijakan pemerintah daerah yang digunakan dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro, diantaranya sebagai berikut:

1. Dana APBD

Dana yang didapatkan dari APBD dikelola dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggunakan dana tersebut untuk melakukan pembangunan pada infrastruktur jalan, pertanian, Pendidikan, kesehatan dan pengelolaan migas yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Dana APBD harus diatur oleh pemerintah dan digunakan untuk masyarakat yang miskin.

Dana APBD yang dialokasikan dalam sektor pertanian cukup membantu para petani untuk mengelola sawahnya. Kabupaten Bojonegoro juga merupakan salah satu lumbung padi terbesar di Jawa Timur. Dana APBD yang dialokasikan dalam sektor kesehatan yang digunakan sebagai tunjangan kesehatan seperti BPJS. Sedangkan dalam pembangunan Pendidikan, pemerintah memberikan bantuan seperti dana bos, yang diberikan kepada masyarakat yang miskin atau kurang mampu. Tingkat alokasi dalam bidang Pendidikan tentunya akan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Bojonegoro.

2. Pengelolaan Migas

Sebelum mulai ada kegiatan industri migas di Kabupaten Bojonegoro, perkembangan nilai ekonomi yang ada di Kabupaten Bojonegoro masih minus. Migas yang ada di Kabupaten Bojonegoro merupakan sumber daya alam yang cukup besar. Namun, adanya migas tidak menjadi jaminan kepada masyarakat menjadi sejahtera. Pemerintah daerah harus bisa mengontrol pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Bojonegoro karena dalam pengelolaan migas membutuhkan modal dan tenaga yang cukup tinggi.

3. Pemerintahan Terbuka

Birokrasi pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai berjalan dengan baik setelah tahun 2007. Kabupaten Bojonegoro menjalankan pemerintahan terbuka dengan tujuan memperbaiki sistem pemerintahan dan menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Dengan menggunakan sistem pemerintahan terbuka, maka masyarakat akan lebih mendapatkan partisipasi dari pemerintah daerah.

Adanya sistem pemerintahan terbuka ini juga mampu membawa Kabupaten Bojonegoro menjadi lebih maju. Pemerintahan terbuka ini meliputi:

- Membuka data
- Membuka layanan akses
- Membuka kesempatan untuk complain, melakukan pengaduan, dan lain-lain.

4. Pengantasan Kemiskinan

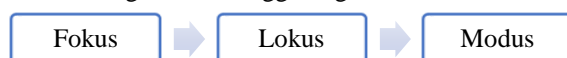
Berikut ini merupakan strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Bojonegoro, antara lain:

- Menyediakan sarana irigasi yang mampu mendukung pekerjaan para petani yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
- Menyediakan air bersih dan sanitasi di daerah yang masih langka akan air bersih.
- Melakukan perbaikan jalan dan jembatan yang rusak di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
- Perluasan kesempatan kerja pada masyarakat.
- Memberikan modal usaha, pelatihan usaha atau keterampilan kerja yang dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Bojonegoro.
- Memberikan jaminan pelayanan Pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu.
- Memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin yang ada di Kabupaten Bojonegoro

D. Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro

Banyak sekali faktor yang digunakan pemerintah daerah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan dengan data yang diperoleh saat wawancara, penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Bojonegoro disajikan dalam bagan sebagai berikut :

Bagan 1. Penanggulangan Kemiskinan



1. Fokus

Pemerintah daerah melakukan tahapan fokus di masyarakat dalam melakukan pendataan siapa saja yang tergolong dalam kategori miskin dengan melakukan pendataan yang berdasarkan dengan indikator dan garis kemiskinan yang telah ditentukan.

Kemudian di plaster atau digolongkan dengan kategori miskin dan sangat miskin. Tahapan plaster dilakukan untuk mengelompokkan dan dicari akar permasalahan yang tepat terhadap masyarakat yang tergolong miskin dan sangat miskin. Pengelompokan tersebut dilakukan pemerintah dengan cara melakukan pendataan yang ada di masyarakat yang disalurkan melalui Kecamatan kemudian dilanjutkan di setiap Desa. Pendataan tersebut dilakukan oleh setiap RT di desa dan kemudian dikumpulkan menjadi satu untuk dilakukan tahapan pengelompokan masyarakat yang tergolong miskin dan sangat miskin yang kemudian diserahkan di Kabupaten untuk dilakukan tahapan yang selanjutnya.

Tahapan selanjutnya adalah tahapan pengelompokan dan menentukan rata-rata atau kebanyakan masalah yang dialami oleh masyarakat yang tergolong miskin dan sangat miskin. Hal tersebut digunakan untuk memberikan solusi terhadap masyarakat, tentunya dalam pengelompokan tersebut terdapat perbedaan solusi dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di masyarakat.

2. Lokus

Pemerintah daerah mulai menentukan karakteristik dan cara penanggulangan yang akan dilakukan pemerintah untuk mengatasi masyarakat di Kabupaten Bojonegoro yang tergolong sebagai masyarakat yang miskin atau sangat miskin. Mengetahui akar permasalahan yang dialami oleh masyarakat yang tergolong dalam kategori miskin dan sangat miskin berguna untuk mengurangi angka kemiskinan atau tingkat kesejahteraan yang ada di masyarakat. Tentunya, masyarakat yang tergolong dalam kategori miskin dan sangat miskin memiliki tingkat akar persoalan yang berbeda-beda.¹⁰ Jadi, pengelompokan tersebut dilakukan dengan tujuan mendapatkan atau mengetahui akar permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Sehingga masyarakat yang tergolong dalam kategori miskin atau sangat miskin tersebut dapat diatasi secara bertahap dengan rata-rata permasalahan yang sering terjadi di masyarakat.

Pemerintah daerah juga melakukan penguatan jaminan masyarakat yang miskin. Penguatan tersebut berupa jaminan kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Jaminan yang diberikan oleh pemerintah dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan perhatian atau perlakuan yang lebih.

Setelah mendapatkan perhatian pemerintah, masyarakat mendapatkan jaminan dalam kehidupannya, akhirnya masyarakat mampu bekerja dengan tujuan untuk mensejahterakan hidupnya sendiri.¹¹ Jadi, pemerintah daerah memberdayakan masyarakat untuk mengubah cara hidup masyarakat yang masih tergolong miskin dan sangat miskin.

3. Modus

Tahapan modus adalah tahapan terakhir, yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan menanggulangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Setelah pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendapatkan data yang telah digolongkan antara masyarakat yang tergolong miskin dan sangat miskin, maka pemerintah daerah melakukan penanggulangan dengan cara modus. Modus yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro ini dengan cara mengumpulkan atau merata-rata penyebab yang kebanyakan terjadi di masyarakat.¹² Sehingga dapat dilakukan proses penanggulangan, yang kemudian dapat menjadikan masyarakat lebih bertanggung jawab atas kesejahteraan hidupnya.

Hal tersebut juga didukung dengan adanya program-program pemerintah daerah seperti menjamin dengan memberikan bantuan di bidang kesehatan dan pendidikan. Adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro berguna untuk mensejahterakan atau mengurangi angka kemiskinan masyarakat terutama di bidang kesehatan. Selain itu pemerintah juga memberikan tunjangan layanan fasilitas sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro terjadi hingga tahun 2008. Fenomena kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro bukan hanya terbatas pada kurangnya keuangan atau ekonomi. Namun, kurangnya inovasi, kreativitas dan kesempatan untuk bersosialisasi juga mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan, diantaranya persoalan masyarakat yang melingkari antara lemahnya masyarakat yang miskin dalam mengembangkan potensi diri dan tertutupnya potensi diri untuk lebih berkembang di kalangan masyarakat.

Kependudukan, ketenagakerjaan, Pendidikan dan kesehatan berpengaruh besar terhadap kemiskinan yang ada di Kabupaten Bojonegoro karena kepadatan penduduk yang semakin meningkat pasti juga akan mempengaruhi jumlah ketenagakerjaan, Pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Bojonegoro. Jumlah penduduk di Kabupaten Bojonegoro mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Adanya kenaikan pertumbuhan penduduk tidak bersamaan dengan faktor-faktor perkembangan yang lain. Dengan demikian, maka

¹⁰ Wawancara dengan Bapak AW Syaiful Huda, Direktur Bojonegoro Institute. Tanggal 10 April 2018

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

jumlah penduduk yang cukup tinggi dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

Kebijakan pemerintah selama tahun 1981-2008 masih belum bisa mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Terdapat banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan Kabupaten Bojonegoro berada dalam kategori kemiskinan, termasuk wilayah Kabupaten Bojonegoro sendiri, kurangnya irigasi, termasuk daerah terisolir dan peran pemeritahan yang kurang baik. Hal tersebutlah yang menyebabkan Kabupaten Bojonegoro berada di posisi nomer 2 atau 3 dengan kategori miskin di Jawa Timur. Kebijakan pemerintah yang mulai menanggulangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Bojonegoro dengan memperbaiki beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan. Dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat maka pemerintah juga meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat yang digunakan sebagai sumber daya dalam pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, pembangunan revitalisasi pembanguna inrastruktur jalan, pertanian, irigasi, Pendidikan dan kesehatan juga dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat juga beberapa kebijakan yang digunakan pemerintah untuk menganggulangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Bojonegoro diantaranya dengan menggunakan dana APBD dengan baik, pengelolaan migas dan sumber daya alam yang ada dengan baik, melakukan pemerintahan terbuka dengan tujuan dapat mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro juga sudah terjadi sejak sebelum tahun 1981, bahkan disebutkan oleh Penders bahwasanya Kabupaten Bojonegoro sebagai daerah di wilayah karesidenan Rembang yang termiskin, terbelakang dalam soal sosial-ekonominya. Selain itu juga disebutkan oleh Prof de Vries, bahwa Kabupaten Bojonegoro sebagai daerah yang menuju kematian.

Dibalik kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro memiliki sumber daya alam yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan wilayah yang ada di sekitarnya. Namun, tingkat kemiskinan yang terjadi lebih besar di Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut juga dikarenakan tanah yang ada di Kabupaten Bojonegoro yang tandus, yang kemudian sering mengakibatkan terjadinya bencana alam di Kabupaten Bojonegoro yang kemudian akan menyebabkan banyaknya kerugian.

B. Saran

Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro yang terjadi sejak dulu masih belum diketahui oleh orang banyak atau bahkan masyarakat Kabupaten Bojonegoro sendiri. Maka dari itu, sudah sepatutnya masyarakat Kabupaten Bojonegoro mengetahui dan menjaga daerahnya agar tidak kembali dalam ranah kemiskinan lagi. Selain itu juga mempertahankan dan mengembangkan terus semua potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah daerah juga harus melakukan

sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga dan mengembangkan Kabupaten Bojonegoro menjadi lebih baik lagi.

Kerjasama dalam mensejahterakan Kabupaten Bojonegoro harus dilakukan antara masyarakat, organisasi masyarakat dan pemerintah daerah. Hal tersebut dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan Kabupaten Bojonegoro.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Arsip

BPS (Badan Pusat Statistik). 1996. *Datar nama desa tertinggal dan tidak tertinggal*. Jakarta: BPS C.V Nasional

Panitia Peringatan Hari Jadi Bojonegoro. 1985. *Bojonegoro 308 Tahun, 20 Oktober 1677-20 Oktober 1985*. Bojonegoro : Pemkab. Kabupaten Bojonegoro

Panitia Penggali dan Penyusunan Sejarah Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II. 1988. *Sejarah Kabupaten Bojonegoro "menyingkap kehidupan dari masa ke masa"*. Bojonegoro : Monalisa

Penders, 1984. *C.L.M Bojonegoro 1900-1942. A Story of Endemic Poverty in North East Java Indonesia*. Singapura: Gunung Agung.

B. Sumber Buku

Badan Pusat Statistik. 1981. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka*: Kabupaten Bojonegoro

Badan Pusat Statistik. 1982. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka*: Kabupaten Bojonegoro

Badan Pusat Statistik. 1983. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka*: Kabupaten Bojonegoro

Badan Pusat Statistik. 1984. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka*: Kabupaten Bojonegoro

Badan Pusat Statistik. 1985. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka*: Kabupaten Bojonegoro

Badan Pusat Statistik. 1986. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka*: Kabupaten Bojonegoro

Badan Pusat Statistik, 1987. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka*: Kabupaten Bojonegoro

Badan Pusat Statistik. 1988. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka*: Kabupaten Bojonegoro

Badan Pusat Statistik. 1989. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka*: Kabupaten Bojonegoro

Badan Pusat Statistik. 1990. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka*: Kabupaten Bojonegoro

Badan Pusat Statistik. 1991. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka*: Kabupaten Bojonegoro

- Badan Pusat Statistik. 1992. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka*: Kabupaten Bojonegoro
- Badan Pusat Statistik. 1993. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka*: Kabupaten Bojonegoro
- Badan Pusat Statistik. 1994. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka*: Kabupaten Bojonegoro
- Badan Pusat Statistik. 1995. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka*: Kabupaten Bojonegoro
- Badan Pusat Statistik. 1996. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka*: Kabupaten Bojonegoro
- Badan Pusat Statistik. 1997. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka*: Kabupaten Bojonegoro
- Badan Pusat Statistik. 1998. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka*: Kabupaten Bojonegoro
- Badan Pusat Statistik. 1999. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka*: Kabupaten Bojonegoro
- Badan Pusat Statistik. 2000. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka*: Kabupaten Bojonegoro
- Badan Pusat Statistik. 2001. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka*: Kabupaten Bojonegoro
- Badan Pusat Statistik. 2002. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka*: Kabupaten Bojonegoro
- Badan Pusat Statistik. 2003. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka*: Kabupaten Bojonegoro
- Badan Pusat Statistik. 2004. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka*: Kabupaten Bojonegoro
- Badan Pusat Statistik. 2005. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka*: Kabupaten Bojonegoro
- Badan Pusat Statistik. 2006. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka*: Kabupaten Bojonegoro
- Badan Pusat Statistik. 2007. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka*: Kabupaten Bojonegoro
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka*: Kabupaten Bojonegoro
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2011. *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2011*.
- Badan Pusat Statistik, 2012, *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia*
- Baudet dan Brugmans, I.J. 1987. *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Daliman. A. *Sejarah Indonesia Abad XIX- Awal XX: Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia- Belanda*
- Edi Suharto, 2009, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Bandung: Alfabeta
- Hamzah, Lukman. 2003. *Sejarah Bojonegoro "Bunga Rampai"*. Bojonegoro
- _____, 2011. *Indikator Kesejahteraan Daerah Provinsi Jawa Timur*. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK), 2003, *Arah dan Kebijakan Umum Penanggulangan Kemiskinan di Kota*
- Louis Gotschalk. 1973. *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*. Depok: UI Press
- Mudji Hartono. *Realisasi Politik Etis di Bojonegoro Pada Awal Abad XX : Kajian Sosial- Ekonomi*.
- Parsudi suparlan, 1984 *kemiskinan di perkotaan: bacaan untuk antropologi perkotaan*, Jakarta: sinar harapan dan Yayasan obor Indonesia
- Prayitno, Hady. 1987. *Petani di Desa dan Kemiskinan*. Jakarta: BPFE
- Robert Chambers. 1987. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Robert J. Kodoatie, Suharyanto, Sri Sangkawati, Sutarto Edhisono. 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo. 1983. *Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: Gajah Mada University Press.
- Sayogyo. 1994. *Kemiskinan dan Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Sayogyo. 1995. *Pertanian dan Kemiskinan*. Jawa: Yayasan Obor Indonesia
- Soetrisno. 1922. *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset Yogyakarta.
- Sukirno, Sadono. 1980. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*. Medan: Brota Gorat
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Tempo, 1997. Volume 36 masalah 45-46. Universitas Michigan. Badan Usaha Jaya Press jajasan jaja raya.
- Tulus T.H Tambunan. 2001. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta Ghalia Indonesia
- Vries de E. 1972. *Masalah-masalah Petani Jawa*. Jakarta: Bhartara

C. Sumber Jurnal

- Suryanto, Bagong. 2010. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Volume 14, Nomor 4

D. Sumber Website

Peraturan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tentang APBD.

<http://bpkad.bojonegorokab.go.id/regulasi/view/perda/97/anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-tahun-anggaran-2014>, diakses pada 7 Februari 2018 pukul 11.26 WIB

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang penanggulangan kemiskinan.

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_BOJONEGORO_6_2015.pdf, diakses pada 15 Mei 2018 pukul 16.03 WIB

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_BOJONEGORO_13_2008.pdf, diakses pada 15 Mei 2018 pukul 16.20 WIB

Penunjang Opeasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

<http://bos.bojonegorokab.go.id/images/perencanaan/768-891-kak-perencanaanpenunjangoperasionaltimkoordinasi-penanggulangankemiskinantkpk-01-01-2018.pdf>, diakses pada 15 Mei 2018 pukul 16.03 WIB

Suyoto. 2016. Bojonegoro di Era Pemerintahan Terbuka.

[http://opengovindonesia.org/files/Bojonegoro_Konsep_dan_Strategi_Pemerintahan_Terbuka_\(1\).pdf](http://opengovindonesia.org/files/Bojonegoro_Konsep_dan_Strategi_Pemerintahan_Terbuka_(1).pdf), diakses pada 7 Februari 2018 pukul 11.26 WIB

